

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti sajikan hasil penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pengerjaan yang relevan seperti yang diuraikan sebagai berikut:

Penelitian (Hidayat et al., 2020) menyatakan bahwa indikator yang berpengaruh positif pada inklusifitas pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta yaitu ekspor barang dan jasa, konsumsi rumah tangga, investasi asing dan domestik, rata-rata lama sekolah serta pendapatan perkapita. Yang memiliki nilai negatif adalah impor barang/jasa dan tingkat pengangguran terbuka.

Penelitian yang dilakukan oleh (Makua et al., 2022) yaitu tingginya fertilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Afrika Selatan. Disamping itu, jika perempuan mempunyai akses yang lebih tinggi ke aspek pendidikan menengah serta pasar tenaga kerja akan memiliki efek positif.

Penelitian oleh (Suprianik, 2023), menunjukkan hasil bahwa banyak aspek yang mempengaruhi hasil dari desentralisasi fiskal di setiap daerah di Indonesia. Pertama, desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perekonomian pertumbuhan. Ketiga, terdapat banyak aspek yang mempengaruhi hasil desentralisasi fiskal di setiap daerah di Indonesia.

Penelitian (Vininda & Yuliana, 2021) menunjukkan hasil bahwa, 1) Pada angka harapan hidup perempuan dan laki-laki memiliki kesimpulan hasil regresi yang berbeda. Angka harapan hidup perempuan memiliki pengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap IPEI di Indonesia, tetapi pada angka harapan hidup laki-laki memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap IPEI di Indonesia. 2) Pada rata lama sekolah perempuan dan laki-

laki mempunyai kesimpulan hasil regresi yang berbeda. Ketika rata lama sekolah perempuan mempunyai pengaruh signifikan dan positif pada IPEI di Indonesia, sedangkan rata lama sekolah laki-laki mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap IPEI di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad Murad, 2019), hasil penelitian tersebut yaitu variabel desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, ketimpangan ekonomi, pengangguran serta kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian tersebut disebutkan penyebabnya adalah pemberian transfer dari pemerintahan pusat dalam bentuk dana perimbangan masih dominan dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Waryanto, 2017) menunjukkan hasil bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja operasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian (Safitri, 2021), hasil dari penelitian tersebut adalah belanja fungsi kesehatan, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan serta pdrb perkapita memiliki pengaruh positif dan signifikan sedangkan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dalam jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ilyas & Prasetya, 2023) menyatakan bahwa mengenai faktor faktor yang diteliti, ditemukan bahwa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif secara signifikan dipengaruhi oleh Variabel Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan dan IPM. Sementara itu, variabel belanja pemerintah fungsi pendidikan dan fungsi ekonomi sama-sama memiliki pengaruh positif terhadap IPEI, namun pengaruh tersebut tidak signifikan.

B. Landasan Teori

1. Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi

Inklusifitas pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pembangunan yang menjamin kesempatan yang sama setiap orang dalam semua lapisan masyarakat, apapun kondisi

pribadinya. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif akan memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk mulai memetik manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Terdapat banyak pendekatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif, seperti pertumbuhan cepat yang dikombinasikan dengan pertumbuhan yang adil, menghilangkan kesenjangan melalui kesempatan yang sama, meningkatkan produktivitas pekerja, memperluas kapasitas produksi, dan menerapkan jaring pengaman sosial (*social safety nets*).

Kajian mengenai inklusifitas pertumbuhan ekonomi mulai berkembang di Asia dari adanya peristiwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatnya kesenjangan (Klasen, 2010). Adanya suatu ketimpangan akan berpengaruh terhadap turunnya kesejahteraan masyarakat dimana hal tersebut merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, perlunya pergeseran skema dari *Pro Poor Growth* ke *Inclusive Growth* (Ali, 2007). Terdapat definisi inklusifitas yang dikemukakan oleh lembaga internasional maupun para peneliti terdahulu.

Menurut (WEF, 2017) Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan produksi yang berkelanjutan selama beberapa dekade pada semua sektor ekonomi yang menciptakan peluang kerja serta mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang dapat didistribusikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat dan dapat menciptakan peluang bagi seluruh masyarakat (oecd, 2022).

Menurut *Asian Development Bank (ADB) dalam* (Anand et al., 2013) Pertumbuhan inklusif memiliki dua aspek. Yang pertama adalah pertumbuhan berkelanjutan, yang pada gilirannya berdampak pada perluasan peluang ekonomi yang tersedia secara sosial. Sementara itu aspek kedua yaitu masyarakat dapat ikut serta dan mengambil keuntungan dari kemajuan ekonomi. Pendapat yang dikemukakan hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh *The United Nation*

Development Programe (UNDP) dalam (Kristyanto & Dwi Budi Santoso, SE., MS., 2015) inklusifitas pertumbuhan ekonomi ialah pertumbuhan yang meningkatkan partisipasi masyarakat dan memungkinkan seluruh pemangku kepentingan memperoleh manfaat yang sama dari pertumbuhan. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan inklusif memerlukan pemerataan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Menurut (ali & son 2007) definisi dari pertumbuhan ekonomi inklusif pertumbuhan bukan hanya menciptakan peluang ekonomi baru namun juga memberikan akses terhadap peluang yang ada di semua lapisan masyarakat, inklusivitas berarti semua komunitas berpartisipasi untuk mencapai kesetaraan di individu komunitas.

Dalam review yang dilakukan (Negara, 2013) terhadap buku penelitian Khan dan Zhuang (2012), ia meyakini pertumbuhan ekonomi inklusif adalah konsep yang luas dan mempunyai banyak aspek. Pertumbuhan ekonomi inklusif terkait dengan isu-isu pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, kesenjangan, infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola, terjaminnya jaringan sosial masyarakat, dan lain-lain. Pada *review* yang dilakukan juga dijelaskan peran lembaga dan tata kelola. Produktivitas tenaga kerja, kualitas infrastruktur, daya saing industri, profesionalisme birokrasi, korupsi, ketimpangan wilayah, kepedulian lingkungan merupakan isu pembangunan.

Dalam penelitian (Vellala, n.d.) ia memperkenalkan kerangka konseptual dimana pertumbuhan inklusif yang harus didorong oleh sejumlah alat seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja produktif, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, pembangunan manusia, kesetaraan gender, infrastruktur dasar sosio-ekonomi dan tata kelola. Tujuan pembangunan inklusif adalah mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar melalui kesempatan kerja, serta akses terhadap peluang ekonomi dan jaring pengaman sosial.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa inklusifitas pertumbuhan ekonomi ialah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan pertumbuhan, perluasan pemerataan dan akses yang sama antar golongan masyarakat, ras dan etnik, agama, jenis kelamin, serta wilayah dapat turut aktif berkontribusi dalam menumbuhkan ekonomi dan mendapatkan manfaat yang sama dalam pembangunan ekonomi. Terdapat 3 kriteria skala dalam pembangunan ekonomi inklusif :

Tabel 2. 1 Skala Kriteria Pembangunan Ekonomi Inklusif

| Angka skala | Kriteria |
|-------------|------------------|
| 1-3 | Kurang memuaskan |
| 4-7 | Cukup memuaskan |
| 8-10 | Sangat memuaskan |

Sumber : BAPPENAS, 2023

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dibentuk dari tiga pilar. Pilar 1 merupakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar 2 ialah pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan pilar 3 merupakan perluasan akses dan kesempatan.

2. Gender

Gender dapat dimaknai adanya perbedaan fungsi dan peran sosial dari laki-laki dan perempuan dalam memberikan kontribusi di masyarakat. Definisi dari kesetaraan gender ialah persamaan keadaan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan kesempatan dan hak asasi manusia. Tujuannya adalah bisa berperan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan serta keamanan. Kata “kesetaraan gender” mungkin masih dirasa asing oleh sebagian kelompok masyarakat indonesia namun sebagian dari mereka telah menerapkan kesetaraan gender di keluarganya. Gender tidak bersifat kodrati. Dalam lingkungan sosial, gender dapat berubah dan berbeda antar wilayah dan antar waktu.

Ketidaksetaraan gender dapat ditimbulkan karena adanya budaya patriaki. Menurut Walbi, Budaya patriaki sendiri diartikan sebagai sistem dari praktik sosial dan struktur dimana disini kaum laki-laki menindas, mendominasi, bahkan kaum perempuan di eksploitasi. Perempuan cenderung diarahkan ke dalam peran domestik dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat merugikan pihak perempuan. Dengan demikian diskriminasi gender dapat mempengaruhi pelaksanaan kesetaraan gender dimana kesetaraan gender ini diperlukan untuk merealisasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini yang sesuai dengan dasar Negara Republik Indonesia yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disamping masih adanya budaya patriaki, pemikiran masyarakat yang masih tradisional juga menjadi salah satu penghambat pelaksanaan kesetaraan gender. Mereka yang masih memiliki pemikiran tradisional (*etnosentrisme*) akan beranggapan bahwa seorang perempuan hanya dapat bekerja di bidang domestik yaitu mengurus rumah tangga, sedangkan seorang laki-laki hanya bisa bekerja di ruang politik, padahal mereka berhak mendapatkan hak yang sama dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun peluang dalam dunia kerja.

Menurut *World Bank*, ketimpangan gender akan menyebabkan pengeluaran pembiayaan tinggi. Alasannya adalah ketimpangan gender tidak hanya berdampak pada kesejahteraan perempuan akan tetapi juga tingkat kesejahteraan laki-laki serta anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa rendah. Maka dari itu, penyetaraan gender itu wajib dilakukan dimana hal ini bukan hanya pemerintah saja yang bergerak, akan tetapi masyarakat juga diharapkan mau untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik.

Dalam mengukur capaian pembangunan manusia disuatu wilayah dengan melihat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, gender memiliki Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender Development Indeks (GDI)*. Indeks pembangunan gender (IPG) sendiri

dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu, 1) Kesehatan, 2) Pendidikan, 3) hidup layak.

A. Rasio Umur Harapan Hidup

Pendidikan merupakan salah satu input yang ada pada fungsi produksi nasional dalam komponen *human capital* (komponen modal manusia). Aspek kesehatan merupakan peran fundamental dalam pertumbuhan dan pembangunan dalam sebuah negara. Kesehatan dapat didefinisikan sebagai aspek kesejahteraan masyarakat juga dapat diartikan sebagai syarat peningkatan produktivitas (Todoro & Smith, 2011).

Menurut Mils dan Gilson (1990) dalam (Muda et al., 2019) pengertian ekonomi kesehatan adalah penerapan konsep, teori, dan ilmu ekonomi pada aspek kesehatan. Oleh karena itu, ekonomi kesehatan terkait erat dengan distribusi sumber daya di berbagai inisiatif kesehatan, jumlah uang yang digunakan untuk layanan kesehatan, organisasinya, dan aspek terkait lainnya. Dampaknya terhadap manusia dan komunitas, termasuk pendanaan berbagai layanan kesehatan, efisiensi penggunaan sumber daya, pencegahan dan pengobatan, serta upaya pemulihan kesehatan. Umur harapan hidup merupakan indikator evaluasi kinerja suatu pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya derajat kesehatan. Umur harapan hidup juga didefinisikan sebagai jumlah rata-rata usia yang ditaksir pada seseorang atas mortalitas di masa mendatang (Dinkes, 2018).

Dalam suatu wilayah, umur harapan hidup yang rendah menandakan pembangunan dalam hal kesehatan belum berhasil, umur harapan hidup yang tinggi berarti pembangunan kesehatan di wilayah tersebut dibidang berhasil. Untuk itu, umur harapan hidup di suatu wilayah diharapkan mengalami peningkatan yang signifikan. Disamping itu, kesehatan erat kaitanya dengan mortalitas. Dimana

mortalitas disini dipengaruhi oleh usia, lingkungan, gaya hidup, dan lain-lain.

Menurut jurnal hutsahut, dkk., (2022) dalam jurnal (eka pratiwi, 2022) bahwasannya umur harapan hidup yang mengalami kenaikan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, artinya disini masyarakat mulai peduli terhadap peningkatan kesehatan individu dimana hal tersebut didapat dengan melakukan pengajaran, sosialisasi serta pendidikan kesehatan.

B. Rasio Rata-rata lama sekolah

Dimensi pengetahuan adalah dimensi indeks pendidikan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama bersekolah diartikan sebagai jumlah tahun pendidikan formal yang diterima oleh seorang warga negara yang dihitung adalah 25 tahun ke atas.

(Todaro & Smith, 2006) memberikan pemahaman yang berbeda mengenai konsep human capital dan sumber daya manusia. Menurutnya, human capital terdiri dari keterampilan, kemampuan, kesehatan, cita-cita, dan lain-lain. Sumber daya manusia (SDM) adalah kualitas dan kuantitas angkatan kerja di suatu wilayah atau negara tertentu.

(Todoro & Michael P., 2006) menyatakan bahwa tujuan pembangunan sangatlah penting dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan suatu negara dalam pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan serta kemampuannya untuk mengasimilasi teknologi kotemporer. Kontribusi ilmu pengetahuan dan investasi sumberdaya akan mendorong kemajuan ekonomi dimana hal ini sesuai dengan gagasan Sollow.

Perkiraan tingkat pendidikan formal masyarakat suatu daerah dapat diperoleh dengan melihat rata-rata lama sekolah. Derajat pendidikan yang dicapai meningkat seiring dengan rata-rata lama seorang bersekolah. Selain merupakan kebutuhan dasar manusia

yang harus dipenuhi, pendidikan merupakan salah satu pendekatan untuk meningkatkan derajat manusia. Rata-rata lama sekolah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$I RLS = \frac{RLS}{Jumlah\ Penduduk}$$

Menurut (Todaro & Michael P., 2000), tingkatan hasil ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang mengenyam pendidikan. Pendidikan ialah salah satu modal manusia yang menunjukkan kualitas kekuatan manusia.

Secara umum ada tiga jenis pendidikan yang ditempuh oleh seseorang :

1. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung di sekolah-sekolah formal. Umumnya penduduknya adalah generasi muda yang belum bekerja atau mempunyai keinginan belajar dan keterampilan yang tinggi. Pendidikan formal biasanya memungkinkan terjadinya pengembangan berkelanjutan.
2. Pendidikan nonformal dikenal juga dengan program pendidikan reguler yang berlangsung di luar jam sekolah. Umumnya peserta pendidikan nonformal adalah orang dewasa. Pendidikan nonformal berdurasi lebih singkat, cakupannya kurang luas, dan lebih banyak melibatkan praktik dibandingkan teori seperti pendidikan formal.
3. Pendidikan informal adalah sistem pendidikan yang berlangsung di luar lembaga pendidikan formal atau pendidikan terorganisir. Proses pendidikan informal biasanya berlangsung di rumah, di mana masyarakat mengumpulkan informasi sendiri atau sendirian dalam kenyamanan rumah mereka sendiri dan berkumpul untuk belajar.

C. Rasio Tingkat pengangguran terbuka

Dalam arti luas istilah “pengangguran” mengacu pada berbagai situasi, seperti tidak bekerja tetapi masih mencari pekerjaan, tidak

mencari pekerjaan, atau bahkan memulai usaha baru. Menurut Sukirno (1994) dalam (Sri Hartati, 2021) pengangguran ialah kondisi individu yang sudah bekerja atau ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

Salah satu permasalahan makroekonomi yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup manusia adalah pengangguran. Hilangnya lapangan kerja seringkali mengakibatkan penurunan standar hidup.

Teori Robert Solow dan Trevor Swan atau disebut teori Solow-Swan berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada tersediannya faktor-faktor produksi yaitu penduduk, akumulasi tenaga kerja dan modal, serta teknologi yang maju.

Teori Adam Smith tentang sumber kekayaan nasional menyatakan bahwa tanah, tenaga kerja, keterampilan, dan modal merupakan kekayaan. Untuk mengukur tingkat pengangguran di suatu daerah, dapat ditentukan dengan menggunakan dua pendekatan:

1. *Labour force approach* (pendekatan angkatan kerja)

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan menggunakan persentase dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan total angkatan kerja.

$$\text{pengangguran} = \frac{\text{jumlah yang menganggur}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

2. *Labour utilization approach* (pendekatan pemanfaatan tenaga kerja)

- a. Bekerja penuh (*employed*) merupakan seseorang yang bekerja penuh (jam kerja mencapai 35 jam perminggu)
- b. Setengah menganggur (*unemployed*) ialah seseorang yang bekerja namun jam kerjanya belum dimanfaatkan secara penuh (dalam seminggu kurang dari 35 jam)

3. Desentralisasi fiskal

Pengalihan akuntabilitas, wewenang, dan kekuasaan di sektor keuangan termasuk yang berkaitan dengan komponen pendapatan (penerimaan) dan belanja (pengeluaran) disebut dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik. Desentralisasi fiskal adalah proses pengalokasian anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi, tugas, dan pelayanan publik pemerintah, tergantung pada cakupan kewenangan pemerintah. Dalam penelitian (Ahmad Murad, 2019) desentralisasi fiskal menjadi kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif karena beberapa alasan utama:

- 1) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang signifikan.
- 2) Pengurangan Ketimpangan Ekonomi: Desentralisasi fiskal juga berpengaruh positif terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi.
- 3) Penurunan Tingkat Pengangguran: Desentralisasi fiskal dapat menurunkan tingkat pengangguran.
- 4) Pengurangan Kemiskinan: Desentralisasi fiskal diharapkan mampu mengurangi jumlah orang miskin. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- 5) Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja: Desentralisasi fiskal melalui PAD (Pembangunan Alokasi Dana) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penyerapan tenaga kerja.
- 6) Peningkatan Layanan Publik: Desentralisasi fiskal juga dapat meningkatkan layanan publik, khususnya bagi orang miskin. Hal ini

dapat mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, desentralisasi fiskal memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan ketimpangan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran, pengurangan kemiskinan, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan layanan publik.

A. Rasio derajat desentralisasi fiskal

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tidak bisa terlepas satu sama lain dikarenakan saling berkaitan. Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibarengi dengan pelimpahan sumber-sumber pedanaan dalam membantu pelaksanaan pemerintahan.

Menurut (Saragih, 2003) dalam buku (Elsye, 2013) desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi dan tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan.

Ebel dan Yilmaz dalam penelitian (Kurniawan, 2018) menyatakan bahwa terdapat variasi dalam indikator untuk mengukur desentralisasi fiskal adalah variabel penerimaan dan pengeluaran. Beliau juga mengatakan bahwa pembeda dari penelitian yang lain yaitu variabel ukuran (*size variabel*). Terdapat 3 variabel yang umum digunakan yaitu GDP, jumlah penduduk, dan luas wilayah.

Penelitian ini menggunakan rasio desentralisasi fiskal yaitu rasio keuangan daerah. Hal ini mengacu pada kemampuan meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) terhadap total pendapatan daerah (TPD) ketika mendanai pembangunan daerah. Dalam hal ini, juga menggambarkan bagaimana pemerintah pusat

melakukan intervensi yang kuat terhadap pembangunan daerah dengan menunjukkan kesediaan setiap daerah untuk mewujudkan otonomi daerah. Cara menghitung rasio derajat desentralisasi fiskal adalah :

$$RDDF = \frac{\text{Pendapatan asli daerah (PAD)}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu digencarkan secara berkelanjutan, karena PAD merupakan salah satu instrumen pendapatan daerah untuk penyediaan jasa dan pembangunan kepada masyarakat lokal. Instrumen PAD dapat dimaksimalkan dari sisi penerimaan pajak dan retribusi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa PAD dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah.

B. Rasio belanja modal

Belanja modal diartikan sebagai pengeluaran pemerintah daerah yang memberikan manfaat lebih lama dari satu tahun anggaran dan meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan pengeluaran sehari-hari. Misalnya, biaya pemeliharaan pada kelompok biaya Administrasi Umum. Data belanja modal tiap kabupaten/kota tersedia pada laporan realisasi APBD. Menurut PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, belanja daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan diperhitungkan sebagai penyusutan kekayaan bersih dalam anggaran tahunan.

Rasio belanja modal bisa dijadikan faktor yang berpengaruh pada desentralisasi fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan mempunyai dampak yang saling melengkapi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Derajat desentralisasi fiskal menentukan sejauh mana pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk pengambilan

keputusan pembangunan ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi lokal mereka, sementara belanja modal menentukan sejauh mana transfer daerah yang diberikan dapat meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur dan ketika dua faktor ini diintegrasikan dengan baik maka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Terdapat pula beberapa alasan penting:

- a. Peningkatan Infrastruktur dan Pendidikan: Belanja modal adalah investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan peningkatan belanja modal, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan sistem pendidikan, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi inklusif. Infrastruktur yang baik dan sistem pendidikan yang memadai meningkatkan produktivitas kerja dan akses terhadap peluang kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Belanja modal yang dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang lebih baik dan sehat memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi inklusif.
- c. Peningkatan Akses terhadap Layanan Publik: Belanja modal juga dapat digunakan untuk meningkatkan akses terhadap layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan. Akses yang lebih baik terhadap layanan publik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong partisipasi mereka dalam ekonomi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
- d. Peningkatan Efisiensi dan Transparansi: Dengan peningkatan belanja modal, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi

dan transparansi dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi dan transparansi dalam penggunaan sumber daya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, rasio belanja modal yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mengelola dana transfer dari pemerintah pusat untuk pembangunan ekonomi lokal. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal mereka, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dalam teori ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, disini memerlukan peran pemerintah (*government*). Dalam teori ekonomi dikenal teori pengeluaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) atau dikenal dengan pendekatan pengeluaran. Pendekatan Pengeluaran adalah ukuran jumlah uang yang dikeluarkan untuk seluruh barang akhir dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan pengeluaran dapat dilihat dengan rumus :

$$GDP = C + I + G + (X-M)$$

Dimana :

C = Konsumsi rumah tangga

I = Investasi

G = Konsumis Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Perspektif Keynesian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian dapat meningkatkan atau bahkan menurunkan pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah maupun konsumsi pemerintah merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menghitung PDB. Oleh karena itu, jika

penanaman modal berkurang maka akan menyebabkan perlambatan perekonomian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio belanja modal untuk mengkaji pengeluaran pemerintah dalam memaksimalkan modal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal adalah salah satu kunci untuk memungkinkan institusi atau entitas memperoleh aset berwujud melalui akuisisi. Untuk menghitung rasio belanja modal dapat menggunakan rumus :

$$RBM = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan proporsi belanja daerah yang dialokasikan terhadap proporsi belanja modal. Belanja modal sendiri mempunyai dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, selain sektor lainnya yaitu sektor swasta, rumah tangga, dan sektor luar negeri. Rasio pengeluaran yang besar berdampak positif terhadap pertumbuhan.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan indeks pembangunan manusia berbasis gender yaitu rasio umur harapan hidup terhadap inklusifitas pertumbuhan ekonomi

Dalam penelitian yang dilakukan (eka pratiwi, 2022) variabel umur harapan hidup bernilai negatif dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muda et al., 2019) yang menyatakan bahwa variabel angka harapan hidup berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin banyaknya masyarakat yang dikenai suatu penyakit maka akan menghancurkan vitalitas, produktivitas, efisiensi bahkan melemahkan inisiatif serta

aktivitas sosial tenaga kerja. Selanjutnya dikatakan Komaruddin (1993) bahwa pendapatan perkapita yang rendah dapat mencerminkan bahwa suatu daya produksi ekonomi dari masyarakat di wilayah yang bersangkutan, dimana dalam hal ini yaitu kesehatan adalah suatu indeks lain dari gambaran efisiensi sosial dan ekonomis. Penelitian (Cabeza-García et al., 2018) menunjukkan bahwa fertilitas yang tinggi pada perempuan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Hubungan indeks pembangunan manusia berbasis gender yaitu rasio rata-rata lama sekolah terhadap inklusifitas pertumbuhan ekonomi

Pendidikan memiliki peran penting jika suatu negara ingin menunjang pembangunannya. Inovasi baru untuk membangun suatu kebijakan dalam hal pendidikan juga diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dimana jika suatu inovasi itu diterapkan secara intensif, daya saing akan lebih besar sehingga produktivitas akan meningkat. Artinya pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Gherardini et al., 2022).

Dalam penelitian (Vininda & Yuliana, 2021) menyebutkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki mempunyai nilai positif dan tidak signifikan terhadap PDRB di Provinsi Riau. Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Deris et al., 2022), dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa Rasio Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan/Laki-laki berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh (Mafida Amalia et al., 2023) juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk perempuan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi inklusif karena pemberdayaan terhadap wanita dapat meningkatkan kesejahteraan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian (Cabeza-García et al., 2018) juga menunjukkan bahwa faktor

perempuan dalam hal pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Hubungan indeks pembangunan manusia yaitu rasio tingkat pengangguran terbuka terhadap inklusifitas pertumbuhan ekonomi

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan salah satu faktor dari aspek yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan seberapa banyak angkatan kerja tidak terserap oleh lapangan pekerjaan. Jika semakin rendah penyerapan tenaga kerja maka akan meningkatkan pengangguran disuatu daerah dimana akan berpengaruh terhadap ketidakmerataan pendapatan dan secara otomatis berimbas pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sri Hartati, 2021) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sheraphim, 2018) bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Hubungan rasio derajat desentralisasi fiskal terhadap inklusifitas pertumbuhan ekonomi

Dalam penelitian (Ahmad Murad, 2019) memberikan hasil bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, ketimpangan ekonomi, pengangguran serta kemiskinan pada Kabupaten/Kota di NTB. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh masih dominannya pemberian transfer daerah dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan yaitu dana alokasi khusus, dana alokasi umum, serta dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dalam penelitian (eka pratiwi, 2022) juga menunjukkan bahwa rasio derajat

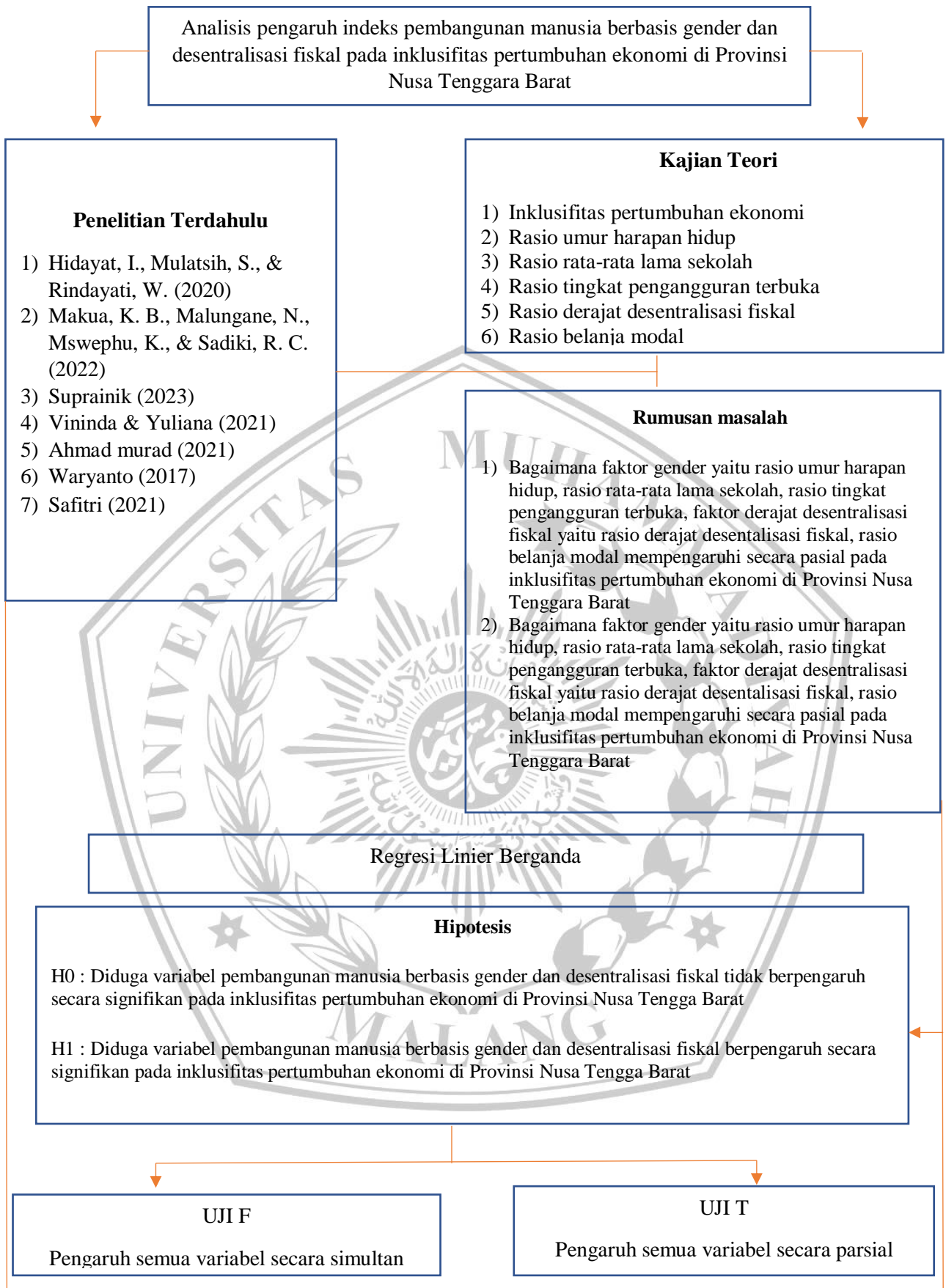
desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan peluang pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah 3T.

5. Hubungan rasio belanja modal terhadap inklusifitas pertumbuhan ekonomi

Penelitian (Yulia sindi, 2022) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan (Safitri, 2021). Penelitian ini tidak selaras dengan hasil yang ditunjukkan oleh (Fajri, 2017), yaitu belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh (Yunus & Amirullah, 2019) menunjukkan hasil bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

D. Kerangka berpikir

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan pengaruh pembangunan manusia berbasis gender dan desentralisasi fiskal terhadap inklusifitas sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penelitian yang berjudul Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia berbasis gender dan desentralisasi fiskal pada inklusifitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung dengan kajian teori Inklusifitas pertumbuhan ekonomi, Rasio umur harapan hidup, Rasio rata-rata lama sekolah, Rasio tingkat pengangguran terbuka, Rasio derajat desentralisasi fiskal, Rasio belanja modal yang diperkuat dengan penelitian (Hidayat et al., 2020), (Makua et al., 2022), (Suprianik, 2023) , (Vininda & Yuliana, 2021), (Ahmad Murad, 2019), (Waryanto, 2017), (Safitri, 2021) dan kemudian munculah rumusan masalah yang telah dijabarkan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji T untuk menjawab hipotesis yang telah disebutkan.

E. Hipotesis

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan di atas maka dapat di simpulkan hipotesis yang dipakai pada penelitian ini adalah :

H0 : Diduga variabel pembangunan manusia berbasis gender dan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan pada inklusifitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

H1 : Diduga variabel pembangunan manusia berbasis gender dan desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan pada inklusifitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat